

RELASI AGAMA DAN POLITIK: STUDI KASUS RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH (RSS) DAN NAHDLATUL ULAMA (NU)



Rizqon Khamami

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Jamia Millia Islamia (JMI) New Delhi, India. Menyelesaikan S1 pada Saddam University for Islamic Studies, Baghdad, Irak. Alumnus SMU TAQ (Takhassus Al Qur'an) dan Pesantren Al-Asy'ariah, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah.

Pendahuluan

Tahun 2004 ditandai dengan diadakannya pemilihan umum (Pemilu) di dua negara, yaitu Indonesia dan India. Tulisan ini adalah upaya untuk membaca satu sisi peta pergerakan dua organisasi massa keagamaan yang berada di dua negara tersebut. Kekalahan Bharatiya Janata Party (BJP), sebuah partai yang dapat diidentifikasi sebagai sebuah partai sayap politik organisasi kultural keagamaan Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), memperlihatkan kasus menarik yang bisa diperbandingkan dengan pertarungan politik yang sedang berlang-

sung di Indonesia, yaitu pertarungan politik yang terjadi di tubuh organisasi kultural keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dengan sayap politik gerakan ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta kemunculan kelompok muda NU kultural.

Meskipun dalam banyak hal, untuk membandingkan dua kasus tersebut terasa berlebihan, karena perbedaan geografi, kultur, sosio, tatanan sosial, dan lain-lain, tapi penulis menemukan kemiripan kasus yang terjadi antara dua organisasi tersebut. Dalam tulisan ini, momen pemilu 2004 menarik untuk ditelusuri.

Tarik menarik antara kubu politik dan kubu kultural antara PKB dan NU, memiliki dampak yang tidak sedikit pada pemahaman kalangan bawah, warga NU. Kalangan akar rumput sulit menangkap kemauan dan arah perjuangan elit-elit NU, menciptakan kebingungan dan kekecewaan. Masuknya NU struktural ke dalam kancah politik, membuat makin parah keadaan, apalagi dengan menarik gerbong-gerbong struktural yang berada di bawahnya. Tokoh panutan lokal dan para kiai ikut terperosok, dan ini tentu saja makin membuat warga NU kehilangan pegangan. Satu sisi, hal ini sebagai pembelajaran politik warga NU—jika bisa dikatakan begitu. Namun yang terjadi di

lapisan bawah justru sebaliknya. Dalam beberapa hal malah menciptakan kejengkelan. Dan penumpahan kejengkelan tersebut hanya melalui satu saluran: kotak suara. Begitu juga yang terjadi di India. Kebingungan dan kekecewaan massa bawah karena pertikaian berlarut-larut antara BJP dan RSS, dan internal BJP sendiri, telah tertumpahkan: BJP terguling.

Hubungan RSS-BJP

Bharatiya Janata Party (BJP) mewakili kultur politik unik, sebuah partai dengan wajah tipikal yang memperjuangkan *Bharatiya Samskriti* (Budaya India) dan *Bharatiya Maryada* (Tradisi India). BJP didirikan sebagai upaya 'Indianisasi', menandingi 'Pembangunan' dari kelompok pengikut Nehru. Partai ini dianggap sebagai sebuah kekuatan politik konservatif, dan sebagai partai politik sayap kanan. Kemunculan BJP dalam sejarah politik India tidak dapat dianggap sebagai sebuah kebetulan. Partai ini timbul berkat keseriusan pendeta-pendeta tinggi Hindu, kelompok Hindu revivalis dan Hindu nasionalis dari berbagai wajah pergerakan Hindu yang berbeda-beda dalam memberdayakan massa dan agama Hindu.

Abad ke-19 ditandai dengan menguatnya gerakan Hindu dalam menegaskan identitas agama ini. Pemuka-pemuka pergerakan tersebut kebanyakan berasal dari elit-elit didikan Inggris dan dari

kelompok Hindu kasta tinggi yang tersebar di Bengal, Bombay, Madras, dan lain-lain. Lebih luas lagi, timbul dua jenis gerakan Hindu dalam rangka mencari definisi baru Hindu, dan dalam melindungi budaya, beserta identitas nasional. Dua gerakan ini bisa disebut sebagai gerakan "modernisme" dan "revivalisme".¹ Kelompok modernis mengadopsi model perubahan sosial dan politik yang berdasarkan pada desain Barat, sedang kaum revivalis berdasarkan pada Hinduisme dengan berusaha mempertahankan nilai-nilai dan norma sosial tradisional, sekaligus mereformasi masyarakat Hindu ke arah integrasi dan solidaritas Hindu. Revivalis atau Renaisans Hindu merupakan bagian utama kebangkitan India, dan ditujukan untuk menentang dominasi penjajah Inggris dari sosio-religious masyarakat Hindu. Kelompok ini berusaha menghidupkan kembali kejayaan masa lampau, dan juga membangkitkan kembali ajaran Hindu, sebagai pengaruh dari semangat kebangkitan yang sedang melanda umat Islam. RSS dan BJP berdiri dari akar-akar revivalis semacam ini.

Renaisans Hindu di India dimulai oleh Raja Rammohan Roy pada zaman penjajahan Inggris dengan mendirikan *Brahmo Samaj*, organisasi yang mendasarkan diri atas prinsip-prinsip *Upanishadas*, ajaran Hindu tradisi, pada tahun 1828. Titik kritik organisasi ini adalah pada ajaran-ajaran Hindu yang dipraktikkan

¹ Walter K. Andersen and Shridhar D. Damle, *The Brotherhood in Saffron – The RSS and Hindu Revivalism*, (N. Delhi: Vistaar Publication, 1987), hlm. 11



Krishna with His Maidens

oleh kalangan Hindu ortodoks dengan memproyeksikan nilai ideal pemikiran Hindu. Dalam upaya tersebut Raja Rammohan Roy menterjemahkan bagian-bagian relevan Upanishad dan Vedanta-Sutra kedalam bahasa Bengali, sehingga rakyat awam dapat mengenali hakekat Hinduisme. Dengan harapan, mereka tidak akan dieksploitasi, dan semangat keagamaan mereka bangkit kembali. Roy berusaha keras menghidupkan keaslian nilai dan ritual Hindu. Dari situ, dia mengembangkan tren revivalis. Roy dianggap sebagai pembaharu Hindu pertama di abad modern.

Semenjak tahun 1843, Rabindranath Tagore menambahi dan mengembangkan ajaran Upanishad Rammohan Roy. Gerakan *Brahmo Samaj* menjadi matang,

dan Keshab Chandra Sen (1834-84) memimpin sayap Hindu yang sejalan dengan *Brahmo Samaj* yang dinamai *Sadharan Brahmo-Samaj*. Sebagai seorang pembaharu sosio-religious, Sen mencampurkan ajaran pembaharuannya dengan ajaran Swami Ram Krishan Pranhans dan Swami Vivekananda.

Di bawah pengaruh Keshab Chandra Sen, *Prathana Samaj* didirikan oleh beberapa tokoh pembaharu di Bombay pada tahun 1867. Sebagai gerakan konservatif kelas atas masyarakat Maharashtra, pengikut gerakan ini mengembangkan program pembaharuan yang mengembangkan ajaran Upanishad, sekte Bhakti, ritual sosial, tradisi dan pakaian Hindu. Kelompok ini memperluas dan memperdalam ajaran-ajaran *Brahmo Samaj*.

Swami Dyananda (1824-83) membentuk *Arya Samaj* untuk menyebarkan ajaran Weda Hindu. Dalam rencana pembaharuannya, dia menyokong pengendoran aturan-aturan kasta, emansipasi wanita dan menghapus penyembahan patung-patung, serta mengilangkan politeisme. Perhatian utamanya adalah untuk mempertegas karakter agama Weda. Dengan orientasi ini Dayanda mengajak umat Hindu untuk kembali ke ajaran awal Weda, dan *Arya Samaj* muncul sebagai gerakan revivalis kuat di India modern.

Seperempat akhir abad ke-19 muncul gerakan *Bengali* di bawah pimpinan Ramkrishna Paramhans, untuk membangkitkan semangat anak-anak muda Hindu kembali ke tradisi agamanya. Para elit masyarakat Bengal tertarik oleh ajaran Ramkrishna. Narendra Nath Dutta, yang kemudian terkenal dengan nama Vivekananda, bergabung dengan gerakan Ramkrishna, dan menjadi murid paling menonjol. Pada tahun 1897, dia mendirikan Ramkrishna Mission untuk mengkampanyekan kebangkitan agama dan budaya Hindu. Berangkat dari kepercayaan kuat pada ajaran Wedanta, Vivekananda memuji budaya Hindu sebagai "tertua dan terbaik". Vivekanda menegaskan bahwa penyelamatan India terletak pada menyegarkan kembali nilai Wedanta dan menghindari diri dari mengikuti ide-ide Barat secara buta. Misi revivalisme Hindu Vivekanda telah mencapai puncak tinggi dengan makin menguatnya pengaruh ajarannya di

seluruh penjuru dunia.

Disamping itu, beberapa perkumpulan internasional, seperti Theosophical Society, melengkapi gerakan revivalisme Hindu India. Perkumpulan ini didirikan di Amerika Serikat oleh Madame Vlavatsky dan Kolonel H.S. Olcott yang pada tahun 1896 dipindah ke India dan bermarkas di Adyar, dekat Madras. Belum lagi kehadiran Annie Besant yang memimpin pergerakan dan kuliah-kuliah tentang Upanishad semakin menambah segar gerakan 'Revivalisme Hindu'.

Pada tahun 1915, berdiri organisasi aliran yang bernama *All India Hindu Mahasabha*. Organisasi baru ini menggabungkan kelompok tradisional Hindu dan Nasionalis Hindu sekaligus, yang lebih dikenal dengan sebutan *Hindu Congress*. Selama masa-masa perang dunia I, Hindu Mahasabha membatasi diri hanya sebagai perkumpulan sukarelawan. Di bawah Vinayak Damodar Savarkar, yang terpilih sebagai ketua pada tahun 1937, organisasi ini berubah menjadi partai politik, menjadi lawan utama Congress dan Muslim League. Partai ini mengidentifikasikan diri pada masyarakat kelas atas dan kalangan konservatif. Ketika Muslim League mengajukan pembentukan negara Pakistan terpisah, Savarkar (ketua Hindu Mahsabha) menulis:

"Ibu pertiwi kita (pemeluk Hindu) adalah satu dan tidak dapat dipecah-pecah. Keutuhan Hindustan dari sejak zaman Weda hingga zaman sekarang adalah fakta-fakta kokoh. Dengan demikian, umat Hindu tidak akan mentolerir partisi India

menjadi zona-zona baru sebagaimana tuntutan kalangan Muslim..."²

Savarkar menentang tuntutan kalangan Muslim untuk mendirikan negara terpisah. Dari situ, dengan mengadopsi utopian Hindu Raj, Savarkar menganggap India semata-mata sebagai tanah air Hindu. Dan dari sinilah bermula kemunculan komunalisme Hindu ekstrem atau Fasisme Hindu di India.

Hubungan Hindu-Muslim yang menegang pada awal tahun 1920-an, dan sikap lunak pemerintah Inggris—dalam kacamata kelompok Hindu—terhadap komunitas Muslim, serta pilihan *non-violence* oleh Gandhi, mendorong kemunculan kelompok nasionalis Hindu militan di bawah nama Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang dipimpin Keshav Baligram Hedgewar. RSS secara resmi dibentuk di Nagpur, Maharashtra pada tahun 1925. Organisasi Hindu ini menghususkan diri merekrut anak-anak muda dan dewasa ke dalam sebuah barisan militan, yang dikenal dengan *Sakha* (cabang) dengan kerangka kerja yang terpusat. Sasarannya adalah untuk melatih laki-laki Hindu guna menumbuhkan sikap militansi dan untuk mempersatukan komunitas Hindu demi kejayaan kembali agama Hindu dan membentuk sebuah masyarakat yang maju. Hal ini dijelaskan dalam ideologi RSS, "*Hindus were the na-*

tion in Bharat and that 'Hindutva' was Rashtriyatva...only Hindu could free Hindustan and save Hindu culture.. Hindu youth had to be organised on the basis of personal character and absolute love for motherland."³

Hedgewar melancarkan gerakan revitalisasi Hindu pertama kali pada bulan September 1925 bersamaan dengan festival Hindu *Dashara*, sebuah festival untuk memperingati kemenangan Rama (seorang tokoh mitologi Hindu) atas Rahwana. Untuk pengenalan, organisasi ini memilih warna bendera RSS dengan kuning-jingga, bergambar dewa Maruti (Hanoman) dan Ramdas Swami (tokoh suci Hindu abad ke-17). Rekrutmen anggota kebanyakan berasal dari kasta Brahmana di daerah Nagpur, dan mereka diminta untuk ikut aktif dalam *Akhara* (senam) pelatihan fisik selama seminggu dan ikut dalam kelas-kelas politik pada hari Minggu dan Kamis. Selama kekerasan komunal pada pertengahan 1920-an, Akharas di daerah Nagpur bertambah dari 230 orang menjadi 570.⁴ Dengan memperkenalkan *Lathi* (tongkat) sebagai senjata bagi *Swayamsevak* (relawan RSS) and juga seragam, RSS selanjutnya bersifat sebagai paramiliter Hindu.

Pada awal tahun 1930-an, RSS berkembang pesat. G.D. Savarkar, saudara tua V.D. Savarkar, menyebarkan RSS ke

² Dikutip dalam A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalisme*, (Bombay: Popular Prakashan, 1976), hlm. 423

³ Di kutip dalam *Shri Guruji and His Mission*, (Delhi: Bharat Prakashan, 1957), hlm. 25

⁴ Walter K. Andersen dan Sridhar K. Damle, *The Brotherhood in Saffron – The RSS and Hindu Revivalism*, (N. Delhi: Vistaar Publication, 1987), hlm. 11

daerah sebelah barat Maharashtra dengan menarik *Tarun Hindu Sabha* (anak-anak muda Hindu), begitu juga *Muktewar Dal* (Organisasi Pembebasan) ke dalam RSS. Afiliasi wanita RSS, *Rashtra Sevika Samiti*, dibentuk pada bulan Oktober 1936 oleh Laxmi Bai Kelkar.

Dengan meninggalnya Hedgewar pada tahun 1940, Madhav Sadashiv Golwalkar—seorang pengajar di Banaras Hindu University—menjadi *Sarsanghachalak* (ketua) RSS dan mengkonsentrasikan pada pengembangan ideologi dan organisasi. Para relawan diajak untuk menganggap diri mereka sebagai sebuah perkumpulan persaudaraan yang memfokuskan diri pada perbaikan masyarakat Hindu dan menegakkan *Hindu Rashtra*, atau bangsa Hindu.

Akan tetapi, pembunuhan tragis Mahatma Gandhi pada tanggal 30 Januari 1948 oleh seorang anggota RSS, Nathuram Vinayak Godse, menjadikan RSS tidak populer. Segera setelah pembunuhan tersebut, Hindu Mahasabha dan RSS dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap hukum dan ketertiban India oleh Pemerintah. Golwalkar, ketua RSS, dan V.G. Deshpande, Sekjen Mahasabha, dan beberapa pemimpin penting lainnya ditangkap. Pada tanggal 4 Februari 1948, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah komunike pela-

rangan RSS.⁵ Sebagai akibatnya, jumlah aktivitas RSS mengalami kemunduran besar dan penyusutan. Pihak Congress menyerang RSS dengan tuduhan sebagai sebuah organisasi fasis, dan sebanding dengan Partai Nazi Jerman. Kendati begitu, sebuah organisasi mahasiswa Hindu yang mengadopsi filosofi RSS, yaitu *Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad* (ABVP) didirikan pada bulan Juli 1948 oleh Madhok, seorang pengajar, untuk menggabungkan semua unsur yang ada dalam pendidikan universitas.

Investigasi lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah membuktikan bahwa Godse bertindak sebagai bagian dari sebuah konspirasi, dan ditemukan bahwa RSS tidak terlibat.⁶ Menyusul hal ini, larangan terhadap RSS dicabut. Setelah pencabutan tersebut, Golwalker melakukan kampanye besar-besaran untuk kembali memperkuat organisasinya dan mengembalikan pamor yang telah hilang di mata masyarakat Hindu tradisional dan Hindu Nasionalis.

Selanjutnya, Golwalker mulai mengagagas dialog dengan Congress. Dia tertarik membangun sebuah aliansi dengan Congress untuk menyalurkan syahwat politik, dengan asumsi RSS tetap menjadi organisasi kultural.⁷ Jaminan yang diberikan kepada pemerintah Congress berkenaan dengan karakter non-politik RSS, dan

⁵ *India 1947-50, Volume one, Internal Affairs*, Bombay 1959, hlm. 555-556

⁶ Lihat, Ministry of Home Affairs, *Government of India, Report of Commission of Inquiry into Conspiracy to Murder of Mahatma Gandhi*, (New Delhi, 1970), bagian I, hlm. 55-57

⁷ Lihat, Gangadhar Indukar, *Guruji: Jeevani of M.S. Golwalkar*, (Sarasanghachalak, RSS, Delhi)



Shiva as Nataraja (*Lord of the Dance*)

tetap setia dengan pilihan kultural, adalah dengan tidak menyediakan ruang konversi partai ini menjadi sebuah partai politik yang berdiri sendiri. Menanggapi tawaran ini, pihak Congress sendiri terpecah, yaitu kubu tradisional Hindu dan kubu liberal. Kubu liberal berpendapat bahwa Congress hanya memiliki satu perkumpulan relawan, yaitu Congress Seva Dal, dan RSS sebagai sebuah organisasi Hindu militan tidak memiliki tempat dalam tubuh Congress atau dalam Seva Dal. Kendati Ketua Congress saat itu, Pattabhai Sitaramayya, memilih sikap positif terhadap tawaran tadi, tetap saja, dalam batas-batas tertentu, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Jawaharlal Nehru sendiri dalam dilema. Pengikut Congress pro-RSS membujuk Vallabhabhai Patel, seorang petinggi Congress, dan Sadar

Patel, ketua komite kerja, untuk mengambil kesempatan agar mengesahkan resolusi membuka peluang keanggotaan Congress bagi anggota-anggota RSS saat Nehru berangkat ke luar negeri. Namun, resolusi ini segera saja dibatalkan atas keberatan Nehru selepas kepulangannya dari luar negeri. Golwalker gagal dalam misinya, dan RSS mencari alternatif lain.

Pada tanggal 6 Januari 1951, sekelompok aktivis RSS bertemu di New Delhi untuk membuat garis-garis pembentukan sebuah partai baru. Pada tanggal 21 Oktober 1951, Bharatiya Jana Sangh berdiri dengan Shyam Prasad Mookerjee sebagai ketua. Partai baru ini melibatkan para aktivis inti RSS, pendukung Arya Samaji, dan bekas pengikut Hindu Mahasabha. Partai baru ini menggabungkan nasionalisme Hindu RSS dan ortodoksi Hindu Mahasabha. Adapun organisasi-organisasi berbasis Hindu lainnya, seperti Ram Rajya Parishad, Hindu Mahasabha, Arya Samaj dan RSS, ikut mewarnai ideologi dan arah Bharatiya Jana Sangh (BJS).

Selanjutnya, untuk memperkuat peran RSS dalam partai baru ini, RSS membentuk organisasi lain, yaitu Vishwa Hindu Parishad (VHP; Dewan Hindu Dunia). VHP dimaksudkan untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan Hindu. Shivram Sankar Apte yang telah bergabung dengan RSS sejak tahun 1939, menjadi ketua VHP. Sejak didirikan pada tanggal 29 Agustus 1964 di Bombay, VHP menjadi penggerak program perbaikan sosio-kultural yang konsisten dengan

strategi dan garis kerasnya. Pada akhir tahun 1966 VHP melakukan kampanye etno-religious, meminta penghentian penyembelihan sapi. Pada masa yang sama, isu ini juga dipakai oleh BJS untuk meraup suara pendukung.

Kendati adanya dukungan anggota RSS, Jana Sangh berkembang lambat selama kurun 1950-an dan 1960-an, dan gagal menjadikan dirinya sebagai rival utama Congress. Menurut pakar politik Bruce Graham, kegagalan ini terjadi karena ketidak-mampuan Jana Sangh “untuk memperluas wilayah pendukungnya”, terutama, identifikasi diri partai ini pada kelompok masyarakat yang hanya berbahasa Hindi, untuk masyarakat di wilayah utara India, dan pemberlakuan tafsiran agama Hindu sebatas oleh kelompok Brahmana ketimbang penerapan nilai-nilai yang lebih terbuka dan bernilai sinkretis Hinduisme rakyat umum. Akan tetapi, pengalaman Jana selama tahun 1970-an, terutama penekanannya pada populisme dan taktik agitasi, memberikan gizi penting bagi kesuksesan BJP pada tahun 1980-an di kemudian hari.

Pada tahun 1977, Jana Sangh bergabung dengan Janata Party, mengalahkan Indira Gandhi dan partai Congress, dan membentuk sebuah pemerintahan pada akhir tahun 1979. Namun akhirnya, ketegangan-ketegangan dalam tubuh gabungan partai-partai ini tak terelakkan. Ketegangan intra-partai tersebut mendorong mereka yang berafiliasi dalam Jana

Sangh untuk meninggalkan Janata Party, dan mendirikan sebuah partai baru: BJP.

BJP didirikan pada tanggal 5 April 1980, di bawah pimpinan Atal Behari Vajpayee. BJP adalah reinkarnasi partai BJS, dan selanjutnya mewakili budaya politik unik yang berbasis *Bharatiya Samskriti* dan *Bharatiya Maryada*. Di bawah Vajpayee, seorang politisi Hindu moderat, BJP ingin melebarkan sayap dengan memasukkan ke dalam komite kerjanya beberapa individu yang bukan berasal dari Jana Sangh, dan bukan pengikut nasionalisme Hindu, di antaranya, Sikander Bakht—seorang Muslim, Ram Jethmalini, dan Shanti Bhusan. Begitu juga, dengan menerapkan sosialisme Gandhi sebagai salah satu pilar BJP, dan membuang doktrin “humanisme integral” yang selama ini diadopsi oleh Jana Sangh.

Akan tetapi, sintesis baru ini gagal mendulang sukses politik. Pada tahun 1984, BJP hanya mengantongi dua kursi di pemilihan parlemen. Setelah pemilu tahun 1984, BJP mengubah jalan. Advani menggantikan Vajpayee sebagai ketua partai. Di bawah kepemimpinan Advani, BJP menarik kembali simpatisan para aktivis Hindu yang hilang dengan langkah politik mengkritik cara-cara pemerintah dalam memberi kemudahan kepada kelompok minoritas, terutama minoritas Muslim. Cara-cara Advani seperti ini, segera saja mendekatkan lagi keberadaan BJP sebagai sebuah organisasi afiliasi di bawah RSS. Selama tahun 1980-an, kombinasi BJP-VHP membentuk kekua-

tan politik dinamis dengan menggunakan simbol-simbol agama secara brilian dalam membangkitkan emosi politik publik. BJP dan VHP memperoleh kemenangan nasional, salah satunya, dengan memakai kampanye menarik golongan kasta rendah yang telah berpindah agama untuk kembali memeluk Hindu.

Pada pemilihan umum tahun 1991, BJP memperoleh dukungan luas. Jumlah kursi di Lok Sabha bertambah dari 85 menjadi 119, dan jumlah suara bertambah dari 11,4 persen menjadi 21,0 persen. Partai ini memperoleh kemenangan besar di negara bagian Uttar Pradesh, di mana jumlah suara membengkak dari 7,6 persen (8 kursi) pada tahun 1989 menjadi 35,3 persen (50 kursi) pada tahun 1991, dan di Gujarat suara dan kursi BJP naik dari 30 persen (12 kursi) menjadi 52 persen (20 kursi). Sebagai tambahan, dukungan BJP juga melebar ke beberapa wilayah-wilayah baru. Di Karnataka, jumlah suara meningkat dari 2,6 persen menjadi 28,1 persen, dan di West Bengal jumlah suara BJP dari 1,6 persen menjadi 12,0 persen. Akan tetapi, pemilu ini juga memperlihatkan keterbatasan mesin pemilu BJP. *Exit poll* ketika itu memperlihatkan, pada saat BJP menerima dukungan besar dari kelas atas dan suara pemilih kelas-kelas terbelakang, BJP memperoleh dukungan buruk dari kasta-kasta rendah, kelompok massa yang dibidiknya sejak awal.

Kemenangan besar BJP pada tahun tersebut tidak lepas dari keberadaan RSS

sebagai kekuatan pendukung yang berdiri di belakang partai ini. RSS adalah organisasi kunci pemberi kekuatan struktural, kultural, dan ideologi kepada BJP. Kini, RSS tercatat memiliki sekitar 30.000 sakhass (cabang), dan lebih dari 2.500 propagandis.⁸

Pertumbuhan RSS antara tahun 1977 dan 1982 sangat fenomenal, sebagaimana dibanggakan oleh Sekjen Rajendra Singh pada tanggal 3 Agustus 1983. Jumlah keseluruhan sakhass (cabang) meningkat dari 6.000 menjadi 19.000, dan diharapkan mencapai angka 21.000 pada akhir tahun 1983. Jika anak cabang diikutkan, total keseluruhan akan mencapai angka 35.000 dengan 700.000 *swayamsevaks* (relawan) yang aktif menghadiri pelatihan dan pertemuan. Pada tahun 2.000, RSS memiliki 45.000 shakas di seluruh negeri, dan membuktikan diri sebagai sebuah jaringan organisasi yang mengagumkan. Bharat Bhushan menjelaskan secara detail:

“...Satu-satunya organisasi yang konsisten mengembangkan diri menjadi pemain dalam politik tingkat mikro, dan memasuki hampir setiap bidang aktivitas yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik adalah RSS. Dalam bidang pendidikan, Vidya Bharati, dewasa ini, adalah organisasi pendidikan sektor non pemerintah terbesar dengan institusi pendidikan berjumlah 13.000, termasuk Saraswati Vidya Mandir (semacam pesantren di NU, pen), 75.000 pengajar dan lebih 1.700.000 pelajar. RSS juga memiliki organisasi-organisasi yang dipimpin oleh

⁸ Pratap Chandra Swain, *Bharatiya Janata Party, Profile and Performance*, 2001, hlm. 86

relawan RSS yang menangani kelompok-kelompok suku (*Vanwasi Kalyan Ashram*), literatur (*Akhil Bharatiya Sahitya Parishad*), kelompok intelektual (*Pragya Bharati*, *Deendayal Research Institute*), Sejarahwan (*Bharatiya Itihas Sankalan Yojana*), Guru (*Bharatiya Shikshan Mandal*, dan *Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh*), Bahasa (*Sanskrit Bharati*), Kebudayaan (*Sanskar Bharati*), orang-orang terlantar (*Seva Bharati*, *Hindu Seva Pratishthan*, *Swami Vivekanand Medical Mission*, *National Medicos Organization*), pasien lepra (*Bharatiya Kushta Nivarak Sangh*), koperasi (*Sahkar Bharati*), konsumen (*Akhil Bharatiya Grahak Panchayat*), publikasi koran dan propaganda lain (*Bharat Prakashan*, *Suruchi Prakashan*, *Lokhit Prakashan*, *Gyanganga Prakashan*, *Archana Prakashan*, *Bharatiya Vichar Sadhana*, *Madhav Prakashan*, *Rashtrtrotthan Sahitya*, *Sadhana Pustak Prakashan*, dan *Akashwani Prakashan*), ilmuwan (*Vigyan Bharati*), integrasi kasta (*Samajik Samrasta Manch*), agama dan dakwah (*Vivekananda Kendra*, *Vishwa Hindu Parishad*, *Hindu Jagaran Manch*, *Bajrang Dal*), masyarakat industri (*Bharat Vikas Parishad*), pensiunan (*Poorva-Sainik Seva Parishad*), warga keturunan India (*Bharatiya Swayamsevak Sangh*, *Hindu Swayamsevak Sangh*, *Hindu Seva Sangh*, *Sanata Dharma Swayamsevak Sangh*, *Friends of India Society International*), dan masih banyak lagi. Organisasi-organisasi ini adalah tambahan untuk sayap politiknya (BJP), sayap persatuan dagang (*Bharatiya Mazdoor Sangh*), sayap wanita (*Rashtriya Sevika Samiti*), sayap pelajar (*Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad*), dan sayap ekonomi (*Swadeshi Jagaran Manch*). Bagi RSS, politik tidak hanya seputar siapa yang dapat berkuasa.⁹

Kekalahan BJP dalam Pemilu 2004

Hasil pemilu India pada tanggal 13 Mei 2004 di luar dugaan. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang tengah berkuasa di India dikalahkan oleh partai Congress. Kekalahan ini menyebabkan Perdana Menteri (PM) India Atal Behari Vajpayee langsung mundur dari jabatannya. Kekalahan itu diakui dengan lapang hati oleh para petinggi partai, kendati kekalahan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan seputar sebab-sebab partai ini bisa kalah. "PM Vajpayee mengakui kekalahan, dan telah mengundurkan diri," kata Menteri Pertahanan India George Fernandez, setelah partai Congress bersama partai-partai mitra koalisinya menang dalam perolehan suara pemilu di negara demokrasi terbesar di dunia itu. "Kami tidak berhasil mendapat mandat dari rakyat," kata Venkaiah Naidu, Presiden Partai Bharatiya Janata (BJP).¹⁰

Dalam pemilu parlemen tersebut, BJP pimpinan Vajpayee dan partai-partai mitra koalisinya telah kehilangan lebih dari 100 kursi di parlemen, yang seluruhnya beranggotakan 545 legislator. Komisi Pemilihan Umum India mengumumkan, partai Congress dan sekutu-sekutunya telah meraih 218 kursi, sementara BJP dan partai-partai mitra koalisinya hanya meraih 188 kursi. Pemilu yang dimajukan dengan memanfaatkan popularitas Vajpayee dan *booming* di bidang ekonomi ini, tidak memenuhi harapan BJP.

⁹ *Hindustan Time*, 3 Maret 2000

¹⁰ *The Asian Age*, 14 Mei 2004

Hasil pemilihan umum India menimbulkan kejutan besar. BJP pimpinan Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee yang populer dan berprestasi dalam pembangunan ekonomi justru dikalahkan partai Congress pimpinan Sonia Gandhi. Padahal hasil jajak pendapat sebelum pemilihan umum memperlihatkan keunggulan BJP. Pemerintahan BJP dinilai sukses mendorong pembangunan ekonomi. Kemenangan BJP dan partai-partai mitra koalisinya, yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Nasional (NDA), sudah diramalkan berbagai pihak sebelum dimulainya proses pemungutan suara. Jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei terkemuka India, Marketing & Development Research Associates (MDRA), memperlihatkan, koalisi BJP bakal meraih antara 280 hingga 290 kursi dari 543 kursi parlemen yang diperebutkan lewat pemilu yang diselenggarakan dalam empat putaran. Jumlah ini jauh di atas jumlah kursi yang bakal diraih Congress dan partai-partai sekutunya, yang diperkirakan hanya akan berjumlah 159-169 kursi. Sisanya, 88 atau 89 kursi, akan terbagi untuk partai-partai lain, seperti Janata Dal, Communist Party of India (CPI), Communist Party of India (Marxist) (CPI-M), dan Bahujan Samaj Party (BSP).¹¹

Perkiraan bahwa Vajpayee akan mempertahankan kursi perdana menteri dapat dilacak pada jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam jajak ter-

sebut, apakah pemerintahan NDA yang dipimpin Vajpayee perlu diberi kesempatan lagi untuk berkuasa? Jawaban "ya" diberikan oleh mayoritas, sekitar 62 persen responden. Jawaban "tidak" diberikan hanya oleh 30 persen responden, yang sebagian besar berasal dari daerah-daerah memang bukan basis pendukung NDA. Sisanya, 9 persen, tidak menjawab atau tidak tahu.

Survey tersebut tidak berlebihan, karena selama pemerintahan BJP, sejak tahun 1996, pembangunan ekonomi India yang berorientasi pada pasar berlangsung stabil, didukung oleh kehidupan politik yang demokratis, dan peran pers yang bebas.

Dengan kepercayaan tinggi yang dibangun dari kemajuan ekonomi yang telah dicapai, BJP dan Perdana Menteri Vajpayee sengaja mempercepat pemilihan enam bulan lebih dini dari jadwal semestinya. Namun, dalam pemilu 2004 tersebut, BJP tidak sanggup mempertahankan posisinya yang diadakan dalam empat tahap dan berlangsung selama tiga pekan, antara 10 April 2004 sampai 10 Mei 2004.

BJP dan koalisinya kehilangan 100 kursi, hanya mengantongi 188 dari 545 kursi parlemen yang diperebutkan. Sementara Partai Kongres dan koalisinya meraih 218 kursi. Muncul pertanyaan, apa penyebab kekalahan BJP? Jika dibandingkan dengan Congress, BJP sesungguhnya memiliki popularitas tinggi dan

¹¹ *Outlook*, 10 Maret 2004

mesin politik yang handal, termasuk jaringan organisasi-organisasi Hindu yang berakar di tengah-tengah mayoritas masyarakat Hindu. Disamping itu, pemerintahan BJP dinilai berhasil mendorong pembangunan ekonomi India.

Kekalahan BJP ini, dalam pengamatan penulis, dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor pemerataan ekonomi yang tidak menyentuh masyarakat luas. *Kedua*, faktor ideologi Hindutva. *Ketiga*, faktor pertikaian antarelit BJP, dan juga antara BJP dan elit RSS, dan semua keluarga di bawah naungan RSS.

Meskipun ekonomi India menanjak bagus sepanjang kendali pemerintahan BJP, namun kekalahan BJP pimpinan Vajpayee itu justru karena isu ekonomi pula. Popularitas Vajpayee dan keberhasilan pemerintahan BJP dalam pembangunan ekonomi tidak memuaskan rakyat. Penduduk India merasa kecewa atas tidak meratanya distribusi hasil pembangunan. Kekalahan BJP dapat dianggap sebagai protes rakyat terhadap pembangunan yang timpang.

Meski PM Vajpayee memiliki popularitas tinggi dan BJP memiliki mesin politik yang tangguh, ia menjadi tidak berdaya di hadapan rakyat yang memiliki pertimbangan, persepsi, dan pilihannya sendiri. Hasil pemilu India kali ini, sekali lagi, memperlihatkan betapa isu ekonomi mendikte kehidupan sosial politik. Atas pertimbangan ekonomi pula, mayoritas penduduk India mendukung partai Congress pimpinan Sonia Gandhi, yang menginginkan kembali terciptanya



Mohandes Gandhi

pemerataan ekonomi yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Congress pada masa-masa sebelumnya yang menerapkan sosialis-sekuler. BJP dianggap kurang memperhatikan nasib masyarakat petani, padahal mereka ini merupakan kelompok pemilih terbesar.

Selama memegang pemerintahan, BJP dipersepsikan telah melaksanakan program dan kebijakan yang hanya berpihak kepada orang kaya dan kurang memperhatikan nasib kaum miskin. Mayoritas pemilih rupanya tidak terbuai dengan kemajuan ekonomi selama beberapa tahun terakhir yang telah mendekati perekonomian negara ini sebagai salah satu calon raksasa ekonomi besar dunia bersama-sama dengan Cina.

Membaca kekalahan tersebut, L.K. Advani mengakui bahwa dua frase yang didengungkannya selama kampanye, yaitu "India shining" dan "feel good" yang

mengindikasikan keberhasilan ekonomi, tidak juga bisa menarik massa pemilih. *"I would like to say that the two catchphrases of our poll campaign—'Feel-Good' and 'India-Shining' - did not benefit us. These phrases, though valid in themselves, were inappropriate for our election campaign. By making them verbal icons of our election campaign, we gave an opportunity to our political opponents to highlight other aspects of India's contemporary reality—poverty and uneven development, unemployment among the youth, problems faced by the farmers - which questioned our claim."*¹²

Faktor kekalahan kedua bagi BJP adalah pandangan partai ini atas ajaran Hindutva. Buruknya penampilan BJP selama pemilu makin memecah dan memperlebar dua pandangan yang berseberangan dalam partai ini. Satu kelompok menegaskan bahwa kekalahan BJP dapat disimpulkan dari kebijakan terakhir BJP dalam merangkul kelompok Muslim, dan dengan begitu, telah meminggirkan Hindutva (aktivisme Hindu). Kelompok garis keras dalam tubuh partai ini diwakili oleh Advani. Politisi ini selalu menginginkan BJP tampil sebagai sebuah partai pro-Hindu. Advani dan kubunya selalu dekat dan mendapat dukungan dari Sang Parivar (keluarga RSS). Namun, di bawah kepemimpinan Atal Behari Vajpayee, BJP meninggalkan kebijakan keras Hindutva dengan memilih jalur moderat. Vajpayee menyadari bahwa partai ini tidak dapat hidup semata-mata dengan mendasarkan

pada Hindutva, namun juga harus merangkul kelompok minoritas Muslim. Selain itu, Vajpayee lebih suka memilih isu pembangunan sebagai agenda kampanye dan selama masa pemerintahannya.

Peranan Hindutva yang telah membesarkan BJP adalah benar dan bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa partai ini menjadi besar lantaran pilihan kebijakan Hindutva. Pada tahun 1984, BJP hanya mengantongi dua kursi di Lok Sabha (Majlis Tinggi). Setelah kasus Babri Masjid di Ayodhya pada tahun 1992, popularitas partai ini mendadak meningkat, hingga mendongkrak prestasi dalam membentuk pemerintahan di Pusat. Ketika partai ini besar dan berkuasa, maka benih-benih perpecahan mulai tumbuh hingga akhirnya terpecah menjadi dua bagian: pro-Hindutva dan kelompok moderat.

Sebagai contoh kedua, BJP merebut kemenangan spektakuler dalam pemilihan di negara bagian Gujarat pada pertengahan Desember 2002 berkat kampanye seorang penggerak Hindu garis keras, Narendra Modi, yang mengangkat *platform* Hindutva garis keras. Modus mudusnya adalah memainkan "kartu agama", berjanji akan memberikan perlindungan kepada kelompok Hindu, dan menjaga kepentingan mereka.

Adapun pada kubu kedua, moderat, selain karena faktor Vajpayee, satu hal yang memaksa BJP mengambil sikap kebijakan moderat adalah untuk menjaga

¹² *The Hindu*, 28 Mei 2004

kekompakan dengan mitra sekutu Aliansi Demokrasi Nasional (NDA). Partai ini sadar, sekali saja BJP memainkan kartu agama, mitra sekutu akan memutuskan hubungan mereka, dan BJP tidak bisa berbuat banyak tanpa sokongan partai-partai tersebut.

Semenjak kekalahan dalam pemilu, timbul kelompok dalam tubuh BJP yang menginginkan partai ini menghidupkan kembali kebijakan Hindutva. Jika kubu ini kuat, pada gilirannya akan ada beberapa hal yang dapat kita tengarai tentang gambaran masa depan partai ini. *Pertama*, posisi Advani akan semakin kuat dalam partai ini, dan Vajpayee terpinggirkan. *Kedua*, BJP akan "bermesraan" kembali dengan RSS, dan berkoordinasi lagi dengan organisasi ini, terutama dalam isu-isu sensitif keagamaan yang selama ini dijauhi BJP. Barangkali saja partai ini akan mengorganisir kembali isu pembangunan kuil Rama di Ayodhya, janji untuk melegislasikan secara nasional larangan penyembelihan sapi, dan larangan konversi agama.

Untuk mengetahui bentuk dan warna BJP setelah kekalahan ini, kita bisa membaca pernyataan Advani, "*We remain firm and unapologetic about our espousal of Hindutva ... Hindutva is the basic identity of India...the BJP has not abandoned, and will not abandon its ideology of cultural nationalism and Hindutva. We remain firm and unapologetic about it. We shall continue to wage an ideological battle against those*

who portray Hindutva as a communal plank for their narrow political ends." Dan, Advani menambahkan, "*India is a secular country because we have never accepted the idea of a Hindu theocratic state.*"¹³

Pertanyaan terkait yang muncul dalam kasus ini, apakah mitra sekutu dalam NDA akan tetap bersatu? Para pengamat percaya bahwa BJP tidak terlalu memusingkan pertanyaan ini, karena BJP tidak memperoleh banyak keuntungan dari keberadaan partai-partai sekutu selama pemilu terakhir. Lebih-lebih, sebuah mitra sekutu penting seperti Telugu Desam Party (TDP) sedang mempertimbangkan kembali hubungannya dengan BJP. Partai sekutu ini mengungkit-ungkit ketidakpuasannya selama bergabung dengan BJP, dan menuduh BJP sebagai biang kekalahan TDP di pemilu terakhir. Pertimbangan ini juga mulai muncul di antara partai-partai lain yang sebelumnya menjadi bagian dari mitra sekutu BJP untuk berdiri di luar NDA demi konsolidasi kembali posisi mereka. Selama ini, alat kohesif koalisi NDA adalah kekuasaan, bukan ideologi. Jadi, masa depan NDA sendiri seperti berada di tepi jurang, apalagi sejak adanya kemungkinan BJP akan mengusung kembali agenda Hindutva guna memperbaiki hubungan partai ini dengan pemilih Hindu. Lebih-lebih, karena BJP berada di bawah tekanan Sangh Parivar (keluarga RSS) untuk kembali ke ideologi dasar Hindutva, ketimbang mementingkan pertimbangan kekuasaan.

¹³ *The Hindu*, 28 Mei 2004

Perselisihan antara kelompok moderat dan garis keras di dalam tubuh BJP semakin melebar. Persengketaan terbaru yang dipicu oleh pernyataan Vajpayee di Manali, Himachal Pradesh, pada tanggal 13 Juni 2004, bahwa kerusuhan Gujarat harus bertanggung jawab atas buruknya penampilan BJP dalam pemilu. Gujarat diguncang oleh kerusuhan komunal setelah dipicu oleh pembakaran kereta api Godhra, yang menyebabkan tewasnya ribuan nyawa kelompok minoritas Muslim. Vajpayee mengaku bahwa segera setelah kerusuhan Gujarat, dirinya mendukung pemberhentian Modi, tetapi dalam tubuh partai sendiri muncul banyak pendapat.¹⁴

Pernyataan Vajpayee tersebut segera saja mendapat tanggapan dari Ketua BJP Venkaiah Naidu. Dengan dukungan pemimpin-pemimpin RSS, VHP dan Bajran Dal, Venkaiah Naidu mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada pengungkitan soal pemecatan Modi.¹⁵

Muncul beberapa spekulasi bahwa Kepala Negara Bagian Gujarat Narendra Modi akan menyerahkan pengunduran dirinya, tetapi hal tersebut menjadi tampak mustahil, karena sokongan kuat dari kelompok garis keras untuk tetap pada jabatannya, seperti Ketua Partai BJP Venkaiah Naidu, K.S. Sudarshan, Dr. Praveen dari elit RSS, dan Ashok Singhal dari VHP.

VHP dan RSS secara terbuka menuhuh bahwa kekalahan BJP disebabkan karena BJP telah meninggalkan ideologi Hindutva. Ashok Singhal dari VHP, sebagai contoh, mengatakan bahwa BJP telah meninggalkan isu-isu yang berkenaan dengan Hindutva, dan kekalahan tersebut adalah akibat dari semua itu; tidak ada alasan lain untuk kekalahan BJP tersebut. Pihak RSS memiliki pandangan yang agak berbeda. Juru bicara RSS, Madan Das Devi, menklarifikasi bahwa pihaknya tidak sepenuhnya menyalahkan Vajpayee dan Advani semata-mata.¹⁶ Pernyataan Vajpayee atas kasus Gujarat tadi hanya menambah tersebarnya bibit kebingungan di akar rumput pada saat BJP seharusnya makin mengkonsolidasikan diri. Kontroversi ini memberi dampak citra makin buruk kepada BJP dan Keluarga RSS. Hal ini membuktikan bahwa partai tersebut tidak pernah bersatu dalam isu-isu utama. Pertikaian elit Hindu ini makin menambah daftar panjang pertikaian-pertikaian yang telah ada selama empat tahun terakhir.

Untuk menjembatani persengketaan ini, pihak RSS mengusulkan agar lebih banyak lagi "RSS pracharaks" (aktivis RSS) dilibatkan sebagai pekerja *full-time* di berbagai lapisan. Dengan demikian, RSS akan tetap mengawasi dan mengatur agenda BJP. L.K. Advani, pemimpin Oposisi di Lok Sabha, mengungkapkan

¹⁴ *The Times of India*, 14 Juni 2004

¹⁵ *The Asian Ages*, 15 Juni 2004

¹⁶ *Sahara*, 20 Juni 2004

opiniya bahwa saat BJP memerintah, strategi politik BJP tidak bijak sehingga hubungan BJP dengan “pemilih ideologis” melemah. Menurutnyanya, telah terjadi alienasi dan melemahnya ikatan batin dengan Sangh Parivar (keluarga RSS). “Kami sedikit bingung tentang bagaimana menghubungkan diri dengan keluarga ideologis kami. Sebagai akibatnya, ironi aneh telah muncul.”¹⁷ Hal ini dapat diartikan bahwa koordinasi antara BJP dan Sangh Parivar sangat renggang. Kekalahan BJP bisa dikatakan karena partai ini berusaha mengadopsi postur sekuler yang tidak bekerja dengan baik. Faktor lain yang dapat dikatakan sebagai penyebab kekalahan BJP adalah hilangnya persentuhan pemimpin partai ini dengan kader-kader di bawah dan masyarakat akar rumput. Dukungan “pemilih ideologis” memiliki tiga segmen: kader partai, ideologi Sangh Parivar, dan dukungan sosial akar bawah. Karena itu, Advani menegaskan bahwa BJP harus membentuk hubungan lebih dekat lagi dengan kader-kader Sangh Parivar untuk memperluas dukungan bawah.

Dengan dukungan kompak tiga segmen tersebut, dan diikuti oleh rapatnya hubungan antara RSS dan BJP, akan memperlihatkan bahwa sayap politik Hindu ini mampu membuktikan diri sebagai sebuah partai yang sangat disegani. Dan, saat timbul pertikaian antarelit organisasi Hindu dengan partai sayap politiknya, maka para kader dan masyarakat

akar rumput menjadi bingung dan kehilangan panutan, dan akhirnya melampiaskan kekesalan mereka di kotak suara: BJP kalah.

NU: Pasca Mukhtamar Lirboyo dan Pemilu 2004

Mukhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang berlangsung pada 21-27 November 1999, memilih KH Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU), menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Berlangsungnya Mukhtamar ini sejalan dengan era reformasi, mendesak PBNU untuk kembali mengurai kembali peta-peta tugas masa depan NU, wawasan keagamaan NU, posisi NU terhadap politik, dan peran masa depan NU.

Dari sudut pandang pemberitaan, Mukhtamar NU ke-30 tersebut tampak tidak terlalu istimewa. Kalaupun ada yang menarik semisal adanya ide untuk mendorong pesantren lebih memikirkan basis material, namun poin ini tidak mendapat perhatian besar dari pers.

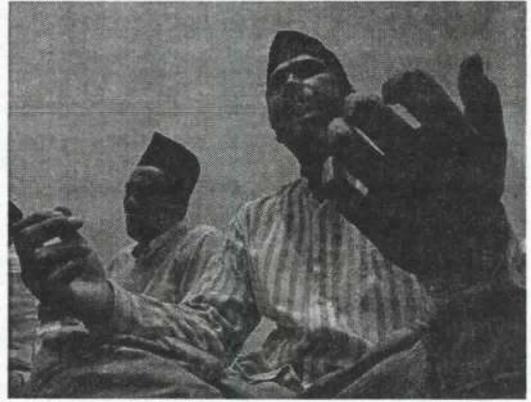
Tetapi, dari sudut bagaimana posisi NU ke depan, Mukhtamar NU ke-30 menjadi sangat berarti. *Pertama*, karena saat itu K.H. Abdurrahman Wahid yang baru lengser dari Ketua Umum PBNU terpilih menjadi presiden RI. Namun persoalannya, apakah NU yang merupakan Ormas terbesar di tanah air akan diproyeksikan sebagai mesin pendulang

¹⁷ *The Times of India*, 28 Juni 2004

suara, sebagaimana Golkar pernah dijadikan alat pengumpul suara pada rezim Orde Baru (Orba)?

Kedua, Muktamar NU bisa dikatakan penting bila mampu merumuskan peran sebagai motor progresifitas Islam. Memasuki millenium baru, Indonesia dihadapkan pada berbagai pertikaian berlatar belakang fanatisme agama, dan NU harus tampil sebagai sosok "Islam substansial", bukan malah memapankan formalisme.

Dalam upaya pemetaan tersebut, Hasyim Muzadi mempertegas wawasan keagamaan NU, yakni substansialisme-inklusif, bukan formalisme-eksklusif. NU menjadi alternatif. Sementara fakta di lapangan, terdapat kekuatan Islam formalistik eksklusif yang menggelisahkan umat agama lain. Oleh karena itu, hubungan agama dan negara perlu dirumuskan agar tidak menggelisahkan agama lain. Begitu juga, NU perlu menegaskan kembali agar agama tidak mengancam kelangsungan kehidupan bernegara, dan negara tidak menghalang-halangi aktifitas beragama warga negaranya. Hasyim Muzadi mengatakan, "Bagi NU hubungan itu sebenarnya sederhana saja. Asal nilai-nilai keagamaan sudah masuk ke dalam struktur dan praktik kenegaraan, sudah cukup. Meski simbol-simbol keagamaannya tidak dipakai, sejauh nilai keagamaan itu telah masuk dalam gerak kenegaraan, tidak ada persoalan. Sebab bagi



wawasan keagamaan NU, yang disebut dengan politik pemerataan, keadilan, kesejahteraan, demokrasi sudah merupakan nilai keagamaan (Islam) juga." Mengenai pola hubungan internal NU, Hasyim Muzadi menegaskan, "Kepemimpinan NU pasca muktamar ke-30 harus memberi perhatian pada ekonomi umat, bisa melaksanakan proses rasionalisasi struktur organisasi, dan dengan semangat pemersatu NU harus membuat rekomendasi bagi proses penyeimbangan kekuatan politik agar tidak terjadi sentralisme dan monopoli kekuasaan sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu."¹⁸

Wabah euforia atas terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden terbawa-bawa hingga ke dalam Muktamar. Kacung Maridjan, pengamat NU dari Universitas Airlangga menyatakan, "Muktamar NU di Lirboyo ini kayak slametan pesta terpilihnya Gus Dur jadi presiden".¹⁹

¹⁸ Kompas, 2 November 1999

¹⁹ Xpos, No 43/II/28 Nopember-4 Desember 1999

Dalam sambutan pada pembukaan Mukhtar tersebut, Gus Dur menegaskan bahwa NU merupakan organisasi agama yang bertugas memberikan kritik kepada pemerintah dari sudut agama. *"Jadi fungsi kontrol yang sudah dilaksanakan lama sekali ini jangan ditinggalkan hanya karena saat ini NU berada di pusat pemerintahan,"*²⁰ Tapi seruan Gus Dur ini bias di lapangan. Bau politik uang tercium menyengat di arena Mukhtar, para pendukung Said Aqiel Siradj menyogok beberapa pimpinan pondok pesantren untuk mendukung Said menjadi ketua. *"Budaya ini mestinya tak bisa dilakukan di kalangan jam'iyah. Kalau sudah begini apa seseorang itu masih bisa dikatakan pantas untuk memimpin organisasi keagamaan ini?"* kritik KH Maksum Jauhari (Gus Maksum).²¹

Perebutan kursi ketua yang tidak sehat ini membuat kalangan muda NU kecewa. Apalagi Mukhtar cenderung membahas soal-soal elitis ketimbang soal-soal kerakyatan yang dialami oleh warga NU sehari-hari. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pun lebih banyak menyentuh soal politik elit nasional yang tak berkaitan langsung dengan NU seperti seruan untuk mengadili Soeharto. Ahmad Suaedy mengungkapkan, *"Kalau tuntutan itu diserukan sebelum Gus Dur jadi presiden barangkali lain maknanya. Ini yang membedakan mukhtar kali ini dengan mukhtar sebelumnya. Dulu di Cipasung dan mukhtar-mukhtar sebelumnya, isu tanah dan*

*petani yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga NU lebih banyak dibahas. Sekarang, disinggung dalam agenda pun tidak,"*²²

Tidak mengherankan bila seruan Gus Dur untuk kritis terhadap pemerintah justru lebih banyak dilakukan oleh aktivis dan intelektual muda NU. Dan, dalam Mukhtar tersebut, mereka yang tergabung dalam lembaga-lembaga NU seperti P3M, Lakpesdam NU, LKPSM NU Yogya, eLSAD, dan LKIS, dengan kreatif menyelenggarakan "mukhtar tandingan" bersamaan dengan mukhtar resmi. Agendanya, bagaimana memberdayakan masyarakat sipil secara konkret.

Para aktivis dan intelektual muda NU itu mengambil tempat berjarak kurang lebih seratus meter dari Pondok Pesantren Lirboyo yang digunakan untuk mukhtar. Tepatnya di Bale Anggraeni RW II Sukorame Kediri. Bertempat di ruangan seluas sepuluh kali lima meter persegi dan duduk lesehan beralaskan tikar pandan, mereka mendiskusikan secara serius persoalan warga NU di akar rumput. Meskipun ruangan sangat panas karena tidak ada eternit sehingga langsung terlihat atap seng, kalangan muda NU ini berhasil menelurkan beberapa kesepakatan. Diantaranya, pembentukan jaringan yang secara serius mencerdaskan rakyat bawah dengan pelatihan-pelatihan berbasis nalar yang kritis.

²⁰ Kompas, 21 November 1999

²¹ Xpos, No 43/II/28 Nopember-4 Desember 1999

²² Ibid.

Muktamar tandingan ini juga membahas perkiraan otonomi daerah yang bakal menguat dan bagaimana warga NU menghadapinya. Persoalan sektor-sektor mana yang perlu diperkuat dengan menggaris-bawahi adanya keberpihakan pada kaum bawah seperti petani dan buruh juga tidak luput dari perbincangan muktamar ala anak muda NU itu. Tuntutan pencabutan dwifungsi TNI yang selama itu hanya menjadi jargon demonstrasi, dan mencoba untuk dijabarkan dengan memberi solusi dengan cara menekan keterlibatan para bintang TNI di level bawah seperti *babinsa* dan *koramil* adalah hal lain yang juga diurai dalam muktamar itu.

Meskipun banyak persoalan yang dibahas anak-anak muda ini bersifat struktural, strategi yang ditempuh untuk menggolkan target lebih banyak bernuansa kultural, seperti pendekatan yang intensif dengan para kiai. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa basis NU adalah pengaruh kiai. Jika kiai kritis, maka pendidikan sosial politik untuk para santrinya bisa lebih demokratis.

Sayangnya, upaya-upaya kaum muda NU ini tidak banyak disorot media yang terlampaui sibuk dengan isu-isu elit di muktamar. Wajar bila kemudian koran-koran maupun majalah lebih banyak berisi berita elit mengenai muktamar. Tapi seiring berjalannya waktu, generasi muda NU yang kritis dan berpihak ke rakyat

bawah tersebut lebih mendominasi wacana di NU, dan menjadi penggerak warna kultural di tubuh NU.

Sejak Muktamar ke-30, organ-organ kekeluargaan mahasiswa NU di luar negeri mengubah diri menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU). Perubahan di hampir semua negara yang menjadi tempat tujuan belajar ini makin menyemarakkan dan memperkuat basis kultural anak-anak muda NU. Bahkan, pada saat penulisan artikel ini, pelajar-pelajar NU di Eropa sedang membicarakan rencana pembentukan Pengurus Wilayah NU Eropa Daratan, dan tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan NU Inggris. Anak-anak muda NU yang terwadahi dalam PCI-NU yang tersebar di seluruh dunia ini berkumpul di mailing-list kmnu2000@yahoo.com sebagai arena bertukar pikiran. Mereka memperlihatkan intensitas kesantriannya dengan kerja-kerja dakwah bagi masyarakat di negara setempat dan warga Indonesia yang ada. Untuk melengkapi kerja-kerja dakwah tersebut, santri-santri NU merambah dakwah lewat media internet dengan membentuk Jaringan Pesantren Virtual (JPV). Jaringan ini melibatkan santri-santri NU yang sedang belajar di Pakistan, Mesir, India, Amerika Serikat, dan lain-lain.²³ Di tempat lain, beragam kelompok pemuda dengan label NU muncul, seperti Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama

²³ Mereka memiliki website: www2.pesantrenvirtual.com, dan forum tanya jawab agama di pesantren@yahoo.com.

(FKGMNU), Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU), dan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU).

Satu hal yang perlu dicatat, kelompok-kelompok muda NU tidak lagi berkuat pada wilayah *ikhtilaf* fiqih yang sempit, namun sudah berani membongkar kemapanan arus utama diskursus keislaman, sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan sudah tidak layak dipakai NU. Mereka umumnya adalah alumni pesantren dan banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Menarik dicermati, kebanyakan mereka adalah lulusan ilmu-ilmu sosial-agama, dan bukan ilmu terapan—satu sisi yang mengisyaratkan ketimpangan. Para aktivis muda NU ini berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang aktif dan peduli terhadap persoalan-persoalan advokasi masyarakat dan pembongkaran nalar sosial-keagamaan masyarakat.

Tidak mengherankan, jika di hampir semua lembaga non-pemerintah ditemukan para aktivis yang gemar bertahlil, yasin, dan istighotsah, namun juga menguasai teori strukturasi, modernisme, post-modernisme, dan analisis sosial yang mumpuni. Mereka menyebar hampir di kota-kota besar di pulau Jawa. Sebagai contoh, di Surabaya berdiri eLSAD (Lembaga Studi Agama dan Demokrasi) dan Yayasan Damar Alit; di Yogyakarta terdapat LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial); di Jakarta terdapat ISIS, Yayasan Desantara; di Malang terdapat Salsabila; di Kediri terdapat LPIM; di Jember terdapat Sketsa; dan di Semarang berdiri LSAP (Lembaga Studi Agama dan Pempa-

ngunan). Meskipun dananya tidak dari NU, lembaga-lembaga ini dikenal sebagai organ nonstruktural NU yang diisi kaum muda NU dan menggarap basis NU.

Di tanah air, beberapa anak-anak muda NU mengembangkan secara luas wacana Islam Liberal yang sedang hangat di dunia, yang kemudian juga melahirkan wacana-wacana keislaman lainnya semisal Islam Emansipatoris, Post-tradisionalisme Islam, dan Islam Pribumi oleh anak-anak muda NU lainnya. Di kalangan anak muda NU inilah wacana keislaman semakin hangat dan berwarna.

Guna mempertemukan berbagai macam pemikiran keislaman yang berkembang di NU yang selama ini terkesan tidak terwadahi, Muktamar Pemikiran Islam diselenggarakan oleh kaum muda Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Asembagus Situbondo, yang berlangsung pada tanggal 2 hingga 5 Oktober 2003 lalu.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya muktamar. *Pertama*, muktamar merupakan wacana "resistensi" terhadap kentalnya *covering* NU sebagai entitas politik. Anak-anak NU yang bergerak di jalur kultural merasa tidak nyaman dengan beban politik NU yang sangat berat. Karenanya, muktamar menjadi terobosan untuk menyingkap khazanah pemikiran keagamaan yang berkembang di tubuh NU, selain karena NU mempunyai modal yang sangat kuat untuk menjadi lokomotif pembaharuan pemikiran keagamaan di tanah air. Muktamar Pemikiran Islam NU juga

sebagai usaha untuk mengukuhkan visi kebangsaan dan kerakyatan, dan melihat pemikiran keagamaan sebagai “konsep yang utuh”. Dalam Mukhtamar ini, anak-anak muda NU mencoba mengeksplorasi epistemologi, metodologi, dan fiqh terapan. Dan hasil menarik dari MPI-NU adalah mencoba untuk melihat doktrin-doktrin keislaman bukan hanya sebagai hukum, melainkan sebagai etika sosial yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia, apa pun agama, suku, dan rasnya. Sejatinya, keislaman tidak hanya dibatasi oleh dan untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat (*rahmatan li al-'alamin*). Islam sebagai etika sosial merupakan jalan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan.

Selain itu, muktamar juga melihat perlunya metodologi keagamaan yang tidak hanya memperdebatkan antara akal dan teks (mana yang didahulukan dan mana yang dinomor-sekian-kan), melainkan mencoba agar akal dan teks memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap kaum lemah. Ini penting untuk mengukuhkan visi kerakyatan, sehingga akal dan teks tidak disubjektifikasi oleh kuasa tertentu. Pada akhirnya, pemikiran keagamaan, termasuk fiqh, dapat menyoal hal-hal yang berkaitan langsung dengan problem kemanusiaan.²⁴

Ada tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukhtamar Pemikiran ini. *Pertama*, meminta PBNU untuk menyelenggarakan Mukhtamar Pemikiran ini secara rutin

dan berkala. *Kedua*, menegaskan pentingnya tradisi sebagai fondasi dasar untuk melakukan proses perubahan sosial-keagamaan di lingkungan NU khususnya. *Ketiga*, menegaskan bahwa fiqh semestinya dilihat sebagai bagian dari etika sosial, tidak semata-mata diperlakukan sebagai aturan-aturan hukum formal dengan pemahaman yang fundamentalistik.

Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada sesi simposium hari terakhir di MPI-NU ini menyampaikan rasa bangga atas perkembangan pemikiran generasi muda NU yang begitu pesat. Cak Nur berbicara tentang hubungan antara tradisi dan pembaruan dan menyatakan bahwa tidak ada sebuah perkembangan di dunia yang tidak diawali dengan proses awal terlebih dahulu. Cak Nur menganalogikan perlunya tradisi untuk sebuah proyek pembaharuan, terutama dalam pembaharuan pemikiran keagamaan. Kekayaan tradisi yang dimiliki NU bisa menjadi sarana ‘melompat’ bagi anak-anak muda dalam mengembangkan keilmuan Islam.

Pada sesi sebelumnya, Rais Syuriah PBNU, Said Aqil Siradj, mengajak warga Nahdliyyin, khususnya kalangan muda NU untuk lebih giat dalam kegiatan berpikir dan kerja-kerja kemanusiaan. Kebebasan berpikir, dalam kacamata Siradj, adalah penting guna menghindari dari kemandekan umat yang telah memupus kreativitas umat Islam selama berabad-abad.

²⁴Penjelasan Zuhairi Misrawi, http://www.islamlib.com/id/page.php?page=comment&mode=view&art_id=431&comment_id=950

Pertumbuhan cepat intelektual keislaman di kalangan muda NU ini menjadi kegairahan baru. Pemikiran konservatif mulai mendapat tekanan kuat dari kaum mudanya yang mulai jenuh dengan pola-pola tersebut. Mereka mencoba mengutak-atik pemikiran gaya lama itu untuk dibongkar, dikritisi, dan dimodifikasi.

Pergolakan pemikiran mutakhir yang berkembang di kalangan anak muda NU ini sangat intensif. Sebagai sebuah proses alam, anak-anak muda NU berkenalan dengan tradisi lain, sementara di sisi lain mereka kental dengan tradisi lama yang tertutup. Meskipun pola pemikiran di kalangan NU ini masih sulit dipetakan, namun secara umum dapat digolongkan dalam dua aliran, yaitu konservatif yang masih menjadi pemikiran sebagian kalangan kiai-kiai sepuh, dan corak liberal yang menjadi warna pemikiran anak-anak muda NU—baik liberal kanan maupun liberal kiri. Mereka adalah sekelompok anak muda yang gemar dengan bacaan-bacaan baru dari berbagai tradisi keilmuan seperti filsafat, teologi, sosiologi, antropologi, dan lainnya.

Anak-anak muda ini tidak sekadar membaca buku-buku, tetapi mendialogkannya dengan tradisi-tradisi yang ada. Dengan demikian, timbul pergolakan pemikiran, pemberontakan, dan kritik yang bersifat positif. Pola pemikiran ini tak terelakkan sering menimbulkan benturan pemikiran antar sesama anggota, bahkan tokoh-tokoh NU. Rencana kehadiran Masdar F. Mas'udi beserta P3M di Kairo,

Mesir, ditolak dan mendapat tentangan keras dari beberapa mahasiswa NU yang bergabung dalam PCI-NU Mesir dalam acara bertajuk "Islam Emansipatoris", bahkan mendapat ancaman bunuh dari Limra Zainuddin, ketua PPMI, organisasi payung mahasiswa Indonesia di Mesir. Konon, penolakan ini terkait dengan perasaan unggul intelektual — untuk tidak mengatakan keangkuhan — beberapa pelajar di Mesir.

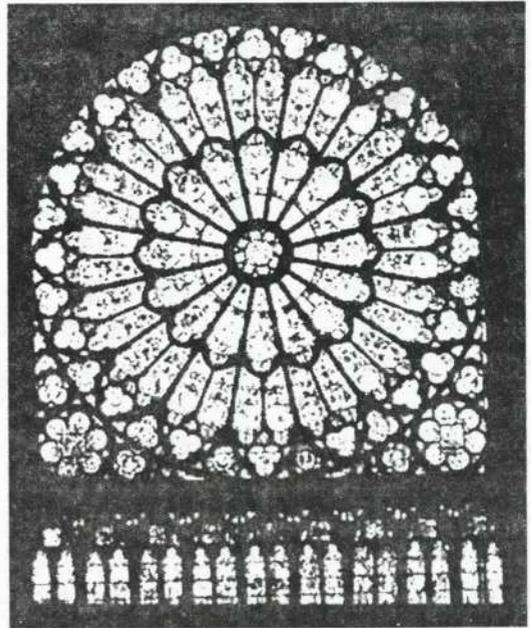
Kebangkitan secara massif anak-anak muda NU dalam karir pemikiran makin meneguhkan peran-peran intelektual sekaligus memperkuat basis kultural. Nahdlatul Ulama yang bermakna "kebangkitan para ulama", sejak awal berdiri, memiliki peran intelektual sangat penting dalam membuka wahana baru kekuatan keumatan ketika itu, baik kekuatan kultural maupun kekuatan struktural.

Kekuatan kultural yang dimiliki NU, sesungguhnya, terbentuk secara langsung oleh ikatan erat antara kiai dan pesantren. Pesantren adalah NU kecil, dan NU adalah pesantren besar. Maka dari itu, kekuatan NU secara kultural mempunyai peran yang sangat luar biasa, baik dalam rangka pencerdasan anak bangsa, pembentukan akhlak manusia, dan wahana menggalang konsolidasi intern warga NU dalam membangun dan memantapkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kenegaraan.

Peran strategis NU secara kultural tersebut bersambut dengan kekuatan NU secara struktural. Kekuatan NU, khususnya

di lingkungan PBNU, mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Sejak awal berdirinya, para pemimpin teras PBNU, baik yang di syuriah maupun tanfidziyah, tampil menjadi pemimpin organisasi keislaman di tingkat nasional. KH. Hasyim Asy'ari, misalnya, masuk dalam kepengurusan *Al-Majlis al-Islami al-A'la Indonesia* (MAI) menjadi pimpinan paling tinggi ketika itu. Demikian juga dalam kepengurusan Partai Masyumi, KH Hasyim Asy'ari juga duduk sebagai Dewan Syuro. Selain beliau, sederet ulama kreatif, seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Saifuddin Zuhri, dan lainnya telah mewarnai perjalanan politik bangsa ini. Sekitar tahun 80-an, muncul lagi ulama-ulama kharismatik yang mensinergikan hubungan NU dengan politik kebangsaan. Mereka, antara lain, KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ahmad Siddiq, dan KH. Ali Ma'sum. Memasuki era reformasi, NU kembali tampil di garda depan, KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Indonesia.

Peran kesejarahan yang telah dilakukan oleh NU tersebut bukannya tidak meninggalkan permasalahan yang serius. Sejak NU tampil sebagai kekuatan politik praktis pada tahun 1952 yang diputuskan pada Muktamar di Palembang, peran kultural NU, seperti pencerdasan anak bangsa dan pemulihan martabat manusia menjadi terabaikan dan terlantarkan. Ketika berfusi dengan PPP tahun 1973, NU juga telah menerlantarkan agenda-agenda sosial kemasyarakatan yang telah



dicanangkan. Baru pada Muktamar NU di Situbondo, tahun 1984, para kiai kharismatik yang didukung para intelektual muda NU generasi tahun 80-an merumuskan kembali agenda sosial kemasyarakatan yang terkenal dengan Khittah 1926.

Khittah 1926 ini dijadikan pedoman bagi warga NU, baik sebagai politisi, aktivis, ekonom, dan birokrat. Semuanya untuk menyukseskan agenda NU sebagai *jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah* yang menitikberatkan perannya pada pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, budaya, dan pembelajaran politik kebangsaan.

Namun, ternyata konsep Khittah '26 yang dirumuskan di Situbondo masih "rentan" dan masih menjadi konsep "terbuka". Atas nama Khittah '26, menjelang pemilu legislatif 2004, politisi

NU di PKB mendesak PBNU memberikan dukungan tradisionalnya dengan mengeluarkan *taushiyah* (rekomendasi) kepada warga NU untuk memilih PKB. Menjawab desakan ini, PBNU, juga atas nama Khittah '26, menyatakan berdiri di atas semua partai politik, dan KH. Hasyim Muzadi berhasil menetralkan posisi NU.

Alasan PBNU tidak mengeluarkan *taushiyah* untuk warga NU dalam menentukan pilihan politiknya karena petunjuk itu sudah ada dalam hasil Mukhtamar NU. Hasyim Muzadi menegaskan, "*Dalam hubungan NU dengan politik, NU sudah mempunyai sikap dan pegangan, jadi tidak perlu taushiyah khusus.*"²⁵ Pegangan yang dimaksud, *pertama* adalah Keputusan Mukhtamar ke-27 di Situbondo pada 1984. Isinya, mengatur hubungan struktural antara NU dan partai politik. Secara tegas disebutkan bahwa NU bukan bagian dari organisasi politik, tapi NU merupakan organisasi keagamaan independen, tidak ada hubungan struktural dengan parpol. Pegangan *kedua* adalah Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri, yang secara jelas mengatur bagaimana aspirasi berdasarkan prioritas. Dalam masalah Parpol ini, NU tidak perlu mengeluarkan *taushiyah* karena dua hal. *Pertama*, kebebasan dalam memilih. Kebebasan itu hendaknya digunakan dengan mempertimbangkan Parpol yang lahirnya difasilitasi NU. Hanya saja, di sini menggunakan istilah 'mempertimbangkan', bukan istilah

'mendukung'. "Karena dipertimbangkan, maka itu bermakna kontrol dan evaluasi. Di sini, dari sekian banyak Parpol, tentu ada yang paling banyak orang-orang NU di dalamnya. Maka, siapa pun yang lahir dari NU, di samping diberi prioritas, juga perlu dikoreksi dan diluruskan. Oleh karena itu, tidak perlu ada *taushiyah*." ²⁶

Kedua, pada kenyataannya orang NU menyebar di berbagai Parpol. Kalau disama-ratakan aspirasinya harus ke satu parpol, maka akan mengalami kesulitan. Solusinya, yaitu membantu atau memberikan dukungan atas mereka yang berasal dari NU di Parpol bersangkutan. Singkatnya, siapa di teritorial itu, politisi asal NU yang bisa menyerap aspirasi paling banyak, maka berikan dukungan kepada yang bersangkutan.²⁷ Dengan begitu, Hasyim Muzadi berhasil menempatkan diri sebagai pengayom bagi semua warga NU yang tersebar di partai-partai politik yang berbeda.

Rais Aam PBNU, KH. AM Sahal Mahfudz mengatakan bahwa NU tetap berpegang pada Khittah 1926 yang secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik mana pun. Bahkan, Mukhtamar NU di Lirboyo merekomendasikan sembilan pedoman yang harus dipegang warga NU yang terjun di arena politik.

"Saya ingin mengingatkan kepada warga dan para pengurus NU bahwa sesuai dengan rekomendasi Mukhtamar Lirboyo bahwa NU tetap posisinya pada Khittah

²⁵ *Kompas*, 11 Maret 2003.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

1926. Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama. NU adalah NU, bukan PKB, bukan PPP, bukan PNU, bukan PKU, dan bukan yang lain. NU adalah *jam'iyah diniyah* (organisasi massa keagamaan) yang bergerak di bidang kemasyarakatan.”²⁸

Lebih lanjut, KH Sahal menegaskan bahwa sebagai warga negara, warga NU tidak bisa dilarang melakukan politik. “Oleh karena itu, Muktamar Lirboyo masih merekomendasikan sembilan petunjuk berpolitik bagi warga NU yang diputuskan Muktamar NU di Krapyak. Dalam berpolitik, warga NU harus dilakukan dalam wawasan kebangsaan dan wawasan integrasi nasional dan dilandasi nurani dan agama, serta moral dan etika yang jernih.”²⁹

Sukses awal Hasyim Muzadi memposisikan NU sebagai kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan menjadikan NU memiliki identitas diri. Menjelang Pemilu 2004, baik pada pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden, identitas NU ini mendapat godaan kembali: NU menjadi rebutan para kontestan. Berhasilkah Hasyim Muzadi mempertahankan posisi tersebut?

Pasca pemilu legislatif (5/4/2004), perkembangan politik bergerak sangat cepat. Pada awalnya, kekuatan politik menggelembung dalam empat kekuatan. *Pertama*, golongan nasionalis-sekuler yang mewacanakan koalisi PDI P dengan Partai Golkar. *Kedua*, kelompok “partai fenomenal”³⁰, yaitu antara Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadian

Sejahtera (PKS) (11/4), disusul Partai Bulan Bintang (PBB). *Ketiga*, kelompok “poros tengah” dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai motor, yang mendapat sokongan dari Muhammadiyah (12/4). *Keempat*, kelompok aliansi 19 partai politik yang dimotori oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Wacana koalisi PDIP-Partai Golkar berantakan, dan kedua partai politik besar ini kemudian terpecah menjadi dua kekuatan yang berseberangan. Partai Golkar mengusung Wiranto sebagai Capres (20/4), sedangkan PDI P mengusung capresnya sendiri, Megawati. Kekuatan ketiga, Partai Demokrat dengan Capres SBY menarik Yusuf Kalla sebagai cawapres (18/4). Keempat, PKS mulai merapat ke PAN dengan Amien Rais sebagai Capresnya (13/4). Kekuatan kelima, Gus Dur dengan aliansi partai-partai kecil, memberikan wacana Capres alternatif; Siswono Yudohusodo. Sementara itu, sesuai dengan hasil forum silaturahmi Buntet I di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon (9/3), forum silaturahmi Buntet II di Pondok Pesantren Qomarul Huda-Lombok, NTB (21/4) dan mandat Mukernas II PKB di Hotel Hilton (25-27/4), PKB sendiri tetap mengusung Gus Dur sebagai Capres.

PDI P dan Partai Golkar sama-sama mencoba mendekati NU. Dan, NU mendadak menjadi primadona, menjadi

²⁸ Kompas, Jumat, 8 Juni 2001

²⁹ Ibid.

³⁰ Agus Susanto (Gus John) Serial NU-ku edisi ke-268: http://groups.yahoo.com/group/Kebangkitan_Bangsa/message/1011

rebutan kekuatan politik besar. Petinggi NU berubah menjadi genit. Jabatan struktural NU menjadi jabatan politis. Kesempatan itu dibaca dengan cermat oleh pihak eksternal NU. Untuk meraup suara terbanyak, semua kekuatan politik yang bertarung itu mencoba mendekati NU.

Wiranto, sesuai dengan hasil rapat internal Partai Golkar (26/4) dan Megawati berdasarkan hasil Rakernas X PDIP (27/4) berlomba-lomba merayu KH. Hasyim Muzadi agar mau menjadi Cawapres mereka. Sementara Gus Dur tetap maju sebagai Capres PKB. PKB terus mengusung Gus Dur sebagai Capres walaupun harus melewati proses penolakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang enggan memberikan fatwa atas permintaan *judicial review* PKB atas Ps. 6 (d) UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wapres terhadap UUD 1945 (22/4). PKB juga memprotes SK KPU No. 26/2004 tentang persyaratan Capres yang dianggap melanggar UUD dan UU No. 4/1997. Karena Komnas HAM menilai SK KPU itu diskriminatif yang dianggap melanggar UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan Konvensi Jenewa (23/4), PKB kemudian membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung (MA), dan hasilnya adalah penolakan MA atas protes PKB.

Wiranto akhirnya beralih menggendeng Solahudin Wahid dengan dukungan PKB. Sementara PDI P berhasil

mengajak Hasyim Muzadi. Menanggapi hal ini, Gus Dur mengatakan bahwa Gus Sholah hanya diberi izin, tetapi tidak didukung; sementara Hasyim Muzadi tidak diberi keduanya, baik izin maupun dukungan.³¹ PKB dan Kiai Langitan akhirnya memberi keputusan final: memberikan dukungannya ke Gus Sholah.

Dengan bertandingnya dua kandidat "resmi NU" dalam merebut suara warga NU, Hasyim Muzadi dari kubu struktural NU, dan Gus Sholah dari politisi-PKB, menjadikan suara warga NU terbelah. Suara-suara bawah yang muncul akibat tarik-menarik perebutan pengaruh ini adalah kekecewaan. Apalagi terseretnya kubu struktural NU dengan melibatkan jajaran struktur NU dari Pusat hingga Ranting, warga NU mengkhawatirkan posisi organisasi massa NU ini di masa depan. Bahkan, pada hari pertama kampanye Pilpres II, Selasa (14/9), suasana di Kantor PBNU tampak sepi. Tidak seorang pun pengurus PBNU dari pagi hingga malam hari hadir di markas besar warga nahdliyyin tersebut. Selain langkanya pengurus di Kantor PBNU, pada masa kampanye Pilpres II, pengurus organ lain juga tampak sepi. Sejumlah aktivis lembaga dan badan otonom yang terlibat dalam tim kampanye Mega-Hasyim, misalnya pengurus IPNU, juga tidak tampak di kantor. Menarik dicermati, sejumlah organisasi dan forum baru terus dibentuk, misalnya Forum Warga NU DKI, Komunitas Aktivistis NU, Kelompok NU

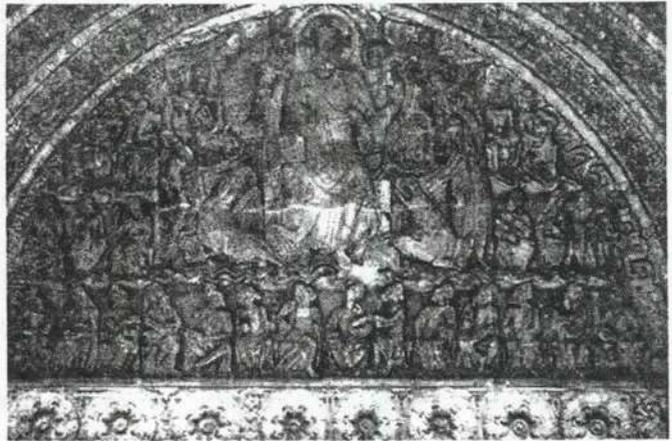
³¹ Kompas, 29 April 2004

Independen, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan dan atas nama NU untuk memenangkan Hasyim Muzadi.³²

Menyikapi hal tersebut, sejak awal, kelompok-kelompok muda NU kultural menggelar demonstrasi menuntut Hasyim Muzadi untuk mundur. Suara kritis di kalangan NU untuk memulihkan khittah juga semakin kencang.

Di Yogyakarta, kelompok-kelompok muda NU pada tanggal 22 Mei 2004 sudah menyuarakan perlunya Mukhtamar Luar Biasa (MLB) NU untuk menindaklanjuti Qarar di Rembang. Di Tasikmalaya, Solo, Salatiga, dan Jakarta muncul keresahan serupa. Di daerah-daerah itu, acara *halaqah* dan *muhasabah* diselenggarakan untuk memulihkan khittah NU.

Kalangan muda kultural nahdliyin ini tampaknya makin jengkel dengan perilaku pejabat struktural Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, sebagai sebuah organisasi, NU saat ini mandek sebagai akibat ulah para pengurusnya, mulai dari tingkat cabang sampai PBNU yang lebih suka mengurus Tim Sukses Capres-Cawapres tertentu. Akibatnya, tugas-tugas NU pun terbengkelai. Setelah kejengkelan itu diungkapkan secara sporadis di daerah masing-masing, anak muda NU itu bersama-sama menumpahkannya dalam forum "Temu Jaringan dan Aliansi



Penegak Khittah 1926" di Pondok Pesantren Soebono Mantofani, Tangerang, Rabu (23/4). Kalangan muda NU yang hadir antara lain Ulil Abshar Abdalla, Masykur Maskub, Abdul Mun'im DZ, Ahmad Suaedy, Zuhairi Misrawi, Rumadi, Moqsith Ghozali, Syaifiq Hasyim, dan anak-anak muda NU lain dari Lakpesdam NU, Wahid Institute (WI), LTN NU, LKK NU, Fatayat NU, P3M, JIL, Desantara, Ciganjur Centre, Kanal Budaya, Ahimsa, serta beberapa LSM dan organisasi anak muda NU lain. Hadir pula anak-anak muda NU dari Banten, Tangerang, Yogyakarta, Batang, Kudus, Kediri, dan Probolinggo.

Forum yang digelar dengan mengundang beberapa tokoh serta sesepuh NU, antara lain Rais Aam PBNU KH M.A. Sahal Mahfudh, KH Fuad Hasyim (Rais PBNU), KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus-Rais PBNU), KH Tholchah Hasan (Rais PBNU), KH Masdar F. Mas'udi (Ketua

³² *Duta Masyarakat*, 15 September 2004.

Umum PBNU/Plh), KH Muhammad Maksud (PWNU Jogjakarta) telah menjadi kubu tersendiri yang cukup kuat, mengingatkan kita pada "kudeta" intelektual muda NU pada Muktamar Situ-bondo, tahun 84-an.

Menanggapi tuntutan anak muda kultural ini, Hasyim Muzadi terang terangan menolak desakan mundur dari posisi Ketua Umum PBNU. Menurut Hasyim, hal itu menyimpang dari ketentuan baku Anggaran Rumah Tangga (ART) NU hasil Muktamar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri tahun 1999. Namun demikian, Hasyim menerima keputusan Syuriah PBNU yang menonaktifkan seluruh fungsionaris NU yang mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta mereka yang terlibat dalam tim suksesnya. Oleh karena dipilih langsung oleh muktamar, khusus untuk jabatan Rais Aam, Wakil Rais Aam, dan Ketua Umum, menurut Hasyim, jika mau mundur harus dilakukan di muka muktamar. Itu sangat berbeda dengan posisi para fungsionaris PBNU lainnya yang hanya diangkat oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Jika fungsionaris yang bersangkutan itu mundur, maka cukup mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Umum atau Rais Aam PBNU.³³

Sehari setelah rapat Syuriah PBNU, 16 Mei 2004, di Rembang, rapat pleno PBNU di Pati Jawa Tengah yang dipimpin langsung Rais Aam KHMA Sahal Mahfudh

memutuskan bahwa semua pengurus NU di seluruh tingkatan yang terlibat Capres/Cawapres maupun tim suksesnya yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan non aktif, dan memutuskan KH. Masdar Farid Mas'udi sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua Umum PBNU. Masdar yang semula masuk dalam jajaran Syuriah PBNU sebenarnya menurut Pasal 40 Ayat 3 ART NU bukanlah orang yang bisa menjadi Plh Ketua Umum. Penunjukan itu terpaksa diambil, konon, karena semata-mata hampir semua Ketua PBNU menjadi tim sukses Kiai Hasyim. Alasan lain, walaupun ada, tidak seorang pun di antara Ketua PBNU yang bersedia duduk menggantikannya walau untuk sementara. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 3 ART NU, bahwa pejabat Ketua Umum PBNU yang lowong diisi oleh salah seorang ketua yang ditetapkan dalam rapat pleno PBNU. Dan, kemudian ketika terpaksa diisi salah satu dari jajaran Syuriah, tidak membuat fungsionaris NU lainnya memandang hal tersebut sebagai penyimpangan.

Tapi, dalam pengamatan penulis, yang lebih berhak menjadi Plh Ketua Umum PBNU adalah Fajrul Falaakh, salah satu ketua PBNU yang tidak terlibat dalam pilpres dan dalam tim sukses manapun. Ketika pertanyaan ini dimajukan oleh Safira Machrusah di milis KMNU2000, dan segera ditanyakan kepada Gus Mus tentang penunjukan Masdar tersebut, Gus Mus menjawab,

³³ *Suara Pembaruan*, Selasa, 08 Juni 2004.

“Penunjukan tersebut sudah sangat tepat, karena NU dipimpin oleh Syuriah”. Dengan analogi struktur pesantren, Gus Mus menjelaskan bahwa Syuriah ibarat pemimpin pesantren—yaitu kiai pengasuh pesantren tersebut, sedang untuk Ketua Tanfidziyah diibaratkan seperti Lurah Pondok.³⁴

Rapat gabungan Syuriah-Tanfidziyah PBNU pada 21 April 2004 yang dipimpin Rais Aam pada akhirnya memandang perlu menyampaikan tiga butir hasil keputusannya. *Pertama*, NU sebagai *jam'iyah* tidak dalam kapasitas mencalonkan atau menolak Capres-Cawapres. *Kedua*, jika ada tokoh NU karena interaksi sosial diajak Parpol, maka itu merupakan hak asasi pribadi masing-masing untuk digunakan atau tidak digunakan. *Ketiga*, NU menghargai setiap upaya tokoh NU untuk berkiprah dalam politik kebangsaan sebagaimana tertuang dalam keputusan Muktamar NU ke-27 di Asembagus, Situbondo yang mengatur hubungan NU dengan Parpol serta Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Jogjakarta, yang mengatur hubungan NU dengan Bangsa, serta.

Langkah-langkah Syuriah di atas adalah langkah kompromi untuk menyelesaikan tuntutan tiga kubu, yaitu kubu politisi-PKB, kubu kultural anak muda NU, serta kubu struktural PBNU. Terlibatnya kubu politisi-PKB ini pada awalnya bermula dari keengganan PBNU memberi taushiyah untuk meng-

giring warga NU memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedang PKB sendiri meminta dukungan tradisional dari NU karena merasa sebagai partai yang didirikan oleh PBNU. Keengganan PBNU mengarahkan suara Nahdliyin ke PKB berangkat dari kekecewaan PBNU atas tersumbatnya saluran aspirasi PBNU, para kiai, dan juga di jajaran yang lebih bawah. Reposisi Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan peran Gus Dur yang terlalu dominan dalam struktur PKB makin menjauhkan PBNU dari PKB. Bahkan, menyikapi konflik dengan PKB, PBNU didesak untuk membentuk partai baru, namun menurut KH Hasyim Muzadi, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi kecuali setelah Pemilu 2004.³⁵

Dalam konflik ini, sebagai Rais Aam PBNU, KH Sahal Mahfudz bersikap netral dan sangat bijaksana, mampu menetapkan diri sebagai pelerai — minimal untuk waktu itu. Lembaga Syuriah yang selama ini tidak memiliki peran penting sebagaimana mestinya, dan selalu kalah oleh Ketua Tanfidziyah PBNU, Syuriah kini menemukan momen penting untuk menegaskan kembali posisi sentralnya. Paling tidak, Syuriah mampu memperlihatkan diri sebagai penyelamat NU di saat-saat krisis identitas seperti itu.

Menarik untuk dicatat bahwa ketiga kelompok atas, masing-masing mengangkat isu khittah NU sebagai alasan norma-

³⁴ Konfirmasi dari Gus Mus ini penulis peroleh dari forward-email oleh Luthfi Thomafi yang disebarakan untuk kalangan terbatas. Penulis masih menyimpan email ini.

³⁵ *Surya*, 20 September 2003

tifnya. Wacana Khittah NU ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing kubu. "Sosialisasi khittah NU mengalami hambatan sejak awal. Karena pilihan kembali ke khittah berada dalam situasi sulit. Beberapa hambatan khittah saat ini, pertama, tidak ada keinginan membaca kembali khittah secara jernih. Kedua, ada pihak-pihak yang menafsirkan khittah sesuai dengan kepentingannya. Ketiga, masih ada nafsu politik praktis yang besar di tubuh NU. Keempat, tidak bisa membedakan antara pilihan individu dan institusi. Kalau ada tokoh NU yang memilih politik praktis, akan dianggap mewakili organisasi NU. Selamanya khittah NU akan berputar-putar di lingkaran itu."³⁶

Untuk membaca Khittah '26, peran-peran politik NU perlu diketahui. Menurut Gus Mus, peran tersebut ada tiga jenis. *Pertama*, politik kebangsaan. Ini dilakukan NU sejak zaman Belanda, Jepang, dan revolusi. Tujuannya, menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia sampai masalah asas tunggal Pancasila. *Kedua*, politik kerakyatan. Jenis ini sudah jarang dilakukan generasi tua, tapi generasi muda melakukannya dengan kontrol dan kritik pada penguasa. Yang banyak digemari warga NU adalah jenis politik *ketiga*, yaitu politik kekuasaan.³⁷

Kelompok kultural yang selama ini lebih banyak digerakkan oleh anak muda NU mendapat angin baru dengan kemunculan Gus Mus yang tidak melibatkan diri dalam konflik perebutan pengaruh

antara kubu struktural dan kubu politisi-PKB. Kelompok kultural ini menjadi kekuatan baru dalam "geger" organisasi massa NU ini. Kelompok ini diperkirakan akan memainkan peran penting pada muktamar NU ke-31 mendatang yang akan digelar 28 November-2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

Sementara itu, Muktamar NU ke-31 sudah bisa ditebak akan menjadi ajang perebutan dua kubu, yaitu kubu struktural dengan tetap mendukung Hasyim Muzadi agar terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU dan kubu politisi-PKB yang dimotori oleh Gus Dur, dalam rangka memperkuat posisi kubu masing-masing, dan untuk menyingkirkan kubu lawannya.

Dari situ, peran anak muda NU kultural, dengan dukungan kiai-kiai sepuh yang tetap setia dengan arah kultural, sangat diperlukan guna memperkuat NU ke depan dengan tidak terlibat langsung dalam pertarungan dua kubu di atas. Diharapkan anak muda NU kultural ini akan menjadikan muktamar NU sebagai batu loncatan membangun peradaban NU, menata peta-peta tugas masa depan NU, wawasan keagamaan NU, posisi NU terhadap politik, dan peran masa depan NU, serta keperdulian terhadap masyarakat bawah. Jika perlu, kubu kultural ini menyingkirkan kubu Gus Dur dan kubu Hasyim Muzadi sekaligus, dengan menempatkan mereka pada sayap politik saja.

³⁶ Gatra, 28 Agustus 2004

³⁷ Ibid.

Kesimpulan

Berdirinya PKB, awalnya, dapat dikatakan sebagai sayap politik NU. Posisi ini sejalan dengan posisi yang dimainkan oleh rekannya di India, BJP. NU sebagai gerakan kultural, juga sebanding dengan keberadaan RSS, yang menginduki sejumlah organisasi di bawahnya. Jaringan kuat RSS yang menyentuh masyarakat luas, sangat membantu memperbesar BJP sebagai saluran politik dan sarana mewujudkan kepentingan-kepentingan Hindu di panggung politik. Keberhasilan BJP, dari sebuah partai baru yang pada awalnya hanya mengantongi dua kursi, hingga menjadi partai mayoritas menentukan pada beberapa tahun lalu, tidak lepas dari peran aktif dan kekompakan dengan induk semangnya, yaitu RSS.

Pertikaian-pertikaian yang muncul di antara elit-elit Hindu, antara elit BJP, dan elit keluarga RSS, berdampak sangat luas pada perolehan suara BJP. Pada pemilu 2004, suara akar rumput yang bingung oleh ulah para elitnya tampak membuktikan adanya protes dan pembangkangan langsung lewat kotak-kota suara. Demikian juga, kebingungan atas sikap dan ulah para elit NU, akan berdampak pada protes, pembangkangan, dan kejengkelan lewat kotak suara. Hasil-hasil survey menggambarkan hal tersebut. Masuknya suara nahdliyin ke kantong SBY-Kalla, disebabkan, salah satunya, oleh perpecahan elit PKB-NU. Konflik perebutan pengaruh di antara kedua elit tersebut membuat posisi pemilih NU serba sulit, bingung dan kecewa.

Demikian pula, keberhasilan BJP memerintah India selama beberapa tahun tidak terlepas dari pilihan RSS untuk konsisten menjadi organisasi kultural, yang tidak menyentuh wilayah-wilayah politik secara vulgar. Pilihan RSS ini tidak akan mengganggu kerja-kerja keagamaan dan sosial Hindu di tengah-tengah masyarakat, dan mengurangi konflik dan pertikaian yang pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan pengaruh. RSS mewakili kepentingan mereka di tingkat nasional lewat sayap politiknya, yaitu BJP. Mengaca kepada pilihan RSS tersebut, NU juga mau tak mau harus memosisikan diri seperti halnya organisasi Hindu India tersebut. Kedua organisasi keagamaan besar ini, RSS di India dan NU di Indonesia, hampir memiliki kesamaan yang sangat dekat dalam beberapa hal. Pilihan NU untuk menjadi gerakan kultural akan mampu mewarnai di tingkat nasional secara luas, sebagaimana RSS mewarnai kehidupan Hindu di India.

Tindakan petinggi Hindu Fundamentalisme India untuk mengambil langkah instropeksi diri dan mencari sebab-sebab kekalahan dalam pemilu 2004 dengan makin mendekatkan diri pada warga Hindu, ikatan ideologis, dan dengan diikuti penyelesaian konflik internal mereka, semestinya segera diikuti oleh NU setelah kekalahan wakil "resmi" NU dalam Pilpres putaran I dan putaran II, terutama untuk segera menyelesaikan krisis identitas di tubuh organisasi massa Islam ini. *Wallu a'lam.* ■